



RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2026 DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

www.dinperkimkotapekalongan.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud implementasi dari pendekatan perencanaan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Pemerintah Kota Pekalongan. Renja ini memuat prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman, penyediaan rumah layak huni, serta penataan kawasan permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Dokumen ini juga disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2026, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target pembangunan daerah di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan teknis, data, maupun dukungan administratif. Semoga dokumen Renja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan program kerja tahun 2026 secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pekalongan, 2025

**Plt.Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Pekalongan**



KHARUDIN, S.T

Pembina TK I

NIP. 197612062005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Landasan Hukum	4
Maksud dan Tujuan	6
Sistematika Penulisan.....	
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Triwulan I Permukiman Kota Pekalongan.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERKIM	47
BAB IV PENUTUP	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Penetapan OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja Penetapan-OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada

masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Penetapan OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode

1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2026

Program, kegiatan, alokasi dan indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja Penetapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
3. Urusan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan
4. Ruang sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- A.** Persiapan penyusunan Renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja; penyusunan agenda tim penyusun Renja dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- B.** Penyusunan rancangan Renja mencakup :
 1. Perumusan yang meliputi persiapan penyusunan rancangan Renja Penetapan, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu

berdasarkan Renstra Perubahan Perubahan, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, penelaahan rancangan awal RKPD Kota Pekalongan, perumusan tujuan dan sasaran; penelaahan usulan masyarakat; dan perumusan kegiatan prioritas.

2. Penyajian Dokumen Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
- e. penutup.

C. Pelaksanaan forum OPD

Forum OPD membahas Pembahasan rancangan Renja Penetapan RKPD kabupaten/kota mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang keluarahan dan kecamatan;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD Kota Pekalongan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, sesuai dengan surat edaran Walikota Pekalongan

D. Penetapan Renja OPD

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menyempurnakan rancangan Renja dengan berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan yang telah ditetapkan kemudian diverifikasi.

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2026;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan;
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;

20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2026;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015.
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Atas Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
25. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
26. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk :

1. Menjadi pedoman untuk mendukung capaian kinerja dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2023 dalam menjalankan program dan kegiatannya;
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja sebagai rujukan perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan tahun 2026.

B. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk :

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan dari Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026;
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan Tahun 2026 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 -2026
- 2.2. (Tabel.T-C.29)
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan
- 2.3. Kawasan Permukiman Kota Pekalongan (Tabel.T-30)
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
- 2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan
Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pekalongan

Tahun 2026 dan Perkiraan Capaian Renstra Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026.

Terdapat 6 (enam) program yang menjadi garapan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2022. Penempatan program tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan telah berusaha sebaik mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Pekalongan, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Kegiatan – kegiatan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam Renstra yaitu Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Permukiman tidak Kumuh, mendukung indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RKPD Kota Pekalongan yaitu (Tabel T-C.29).

Tabel TC-29
HASIL REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TW I TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH

NO	Indikator Program /Indikator Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra 2026-2029	Kondisi Kinerja Kinerja pada Awal Renstra (2016-2021)	Realisasi TW I Tahun 2026	2026		Capaian Renstra Tahun 2024	Presentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026-2029	Status Ketercapaian Tahun Target Akhir Renstra
						Target 2026	Realisasi TW I			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	29.45	100	29.45	100.00	100.00	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	105.95	105.95	16.17	100	16.17	105.95	100	Tercapai
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	25.93	100	25.93	100	100	Tercapai
Program Pengembangan Perumahan										
	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	91.35`	100	n/a	n/a	n/a	68.78	1000	Tidak Tercapai
Program Kawasan Permukiman										
	Luas kawasan permukiman kumuh	Hektar	121.39	100	n/a	n/a	n/a	126.32	126.32	Tercapai
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	Hektar	2,075.41	2,075.41	n/a	n/a	n/a	2,075.41	2,075.41	Tercapai
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	Persen	63.04	0	n/a	n/a	n/a	6.80	63.04	Tercapai
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	50.00	50.00	n/a	n/a	n/a	100	50.00	Tercapai

2.2. Hasil Evaluasi RKPD TW I Tahun 2026 DINPERKIM Kota Pekalongan

No	Indikator Nama Keg / Sub Keg / Indikator	Indikator	Satuan	RKPD TAHU N 2026 Realisasi				Realisasi Capaian		Status Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian TW I	Target Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Persen	8.89	0	0	0	8.89	100 Persen	Tidak Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	0	0	0	0	0	3 Dokumen	Tidak Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	0	0	0	0	0	2 Dokumen	Tidak Tercapai
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0	4 Laporan	Tidak Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen						100 Persen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bu lan	22	0	0	0	22 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	Tercapai

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	3	0	0	0	0	12 Dokumenx	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	1	0	0	0	0	1 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat	Persen							
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	1 Paket	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat	Persen	0	0	0	0	0	100 Persen	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	1	0	0	0	0	4 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	4 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	1 Paket	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	2 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1	0	0	0	0	2 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1,33	0	0	0	0	75 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persen	100	0	0	0	0	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	0	0	0	0	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	0	0	0	0	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	0	0	0	3	12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	11.11	0	0	0	11.11	100 Persen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	6	0	0	0	6	18 Unit	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire	Unit	1	0	0	0	1	1unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0	0	0	0	1 Unir	1 Unit	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang	Dokumen	1	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi	Dokumen	1	0	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	Kegiatan	1	0	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggapan Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	0	0	0	0	0 Orang	6 orang	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Orang	0	0	0	0	0 Orang	6 orang	
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan	Orang	0	0	0	0	0 Orang	6 Orang	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan	Persen	0	0	0	0	0	100 Persen	

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINPERKIM KOTA PEKALONGAN**

	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit/Rumah	0	0	0	0	0	4 Unit/Rumah	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit/Rumah	0	0	0	0	0	2 Unit /Rumah	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persen	0	0	0	0	0	100 Persen	
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi	Laporan	0	0	0	0	3 Laporan	3Laporan	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman	Persen	0	0	0	0	0	100 Persen	
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang	Dokumen	0	0	0	0	0	2 Dokumen	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi	Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	Hektar	0	0	0	0	0	102 Hektar	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	0	0	0	0	0	97 Unit Rumah	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	0	0	0	0	0	2 Ha	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	Unit	0	0	0	0	0	71 Unit	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	Persen	0	0	0	0	0	1.04	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Unit Rumah	0	0	0	0	0	386 Unit Rumah	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	Persen	0	0	0	0	0	68.48 Persen	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	0	0	0	1 Dokumen	4 Dokumen	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	0	0	0	0	0	12 Lokasi	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Laporan	0	0	0	0	0	1 Laporan	
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	0	0	0	0	1 Lokasi	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	Persen	0	0	0	0	0	100 Persen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti	Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi	Persen	0	0	0	0	0	50 Persen	
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka	Dokumen	0	0	0	0	0	2 Dokumen	

2.2 Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, termasuk layanan dasar terkait hunian layak, penataan permukiman, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan kawasan kumuh.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinperkim mencakup:

- Penyediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
- Penyediaan dan perbaikan infrastruktur permukiman, seperti drainase, sanitasi, dan jalan lingkungan.
- Fasilitasi pembangunan rumah swadaya dan rumah susun.

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya (2025)

Beberapa indikator pelayanan dasar dan capaian kinerja tahun sebelumnya yang menjadi dasar penyusunan rencana 2026:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realiasi 2025	Presentase Capaian
1	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	350 unit	310 unit	88,57%
2	Pengurangan luasan kawasan kumuh (Ha)	5,00 Ha	4,25 Ha	85%
3	Peningkatan akses sanitasi layak	92%	89%	96,74%
4	Persentase infrastruktur dasar yang ditingkatkan	100% kawasan sasaran	93% kawasan	93%
5	Kegiatan fasilitasi rumah swadaya	8 lokasi	7 lokasi	87,5%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Isu Strategis Pelayanan Tahun 2026 Berdasarkan evaluasi dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan, isu pelayanan yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2026 meliputi:

- Masih adanya backlog hunian dan rumah tidak layak huni yang signifikan.
 - Ketimpangan akses infrastruktur permukiman di wilayah pinggiran dan padat penduduk.
 - Penanganan kawasan kumuh belum menyeluruh, terutama di bantaran sungai dan area padat.
 - Masih terbatasnya partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan permukiman.
 - Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai semua kebutuhan layanan secara optimal.
- Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

Arah Perbaikan Pelayanan Tahun 2026

Dalam rancangan tahun 2026, Dinperkim merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan melalui:

- Peningkatan efektivitas program RTLH dan rumah swadaya berbasis data MBR terbaru.
- Penyusunan rencana penanganan kumuh terpadu berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat.
- Kolaborasi pendanaan antara APBD, APBN, CSR, dan swadaya untuk efisiensi pelaksanaan.
- Digitalisasi sistem layanan dan pengaduan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman.
- Peningkatan kualitas perencanaan teknis dan pemantauan lapangan untuk menjamin output kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan menunjukkan bahwa Dinperkim Kota Pekalongan telah mencapai sebagian besar target pelayanan dasar, namun masih terdapat beberapa tantangan struktural dan fiskal yang perlu diatasi. Rencana Kerja Tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat dampak layanan langsung ke masyarakat, memperluas cakupan kawasan sasaran, dan memastikan pelayanan berjalan sesuai standar NSPK dan SPM.

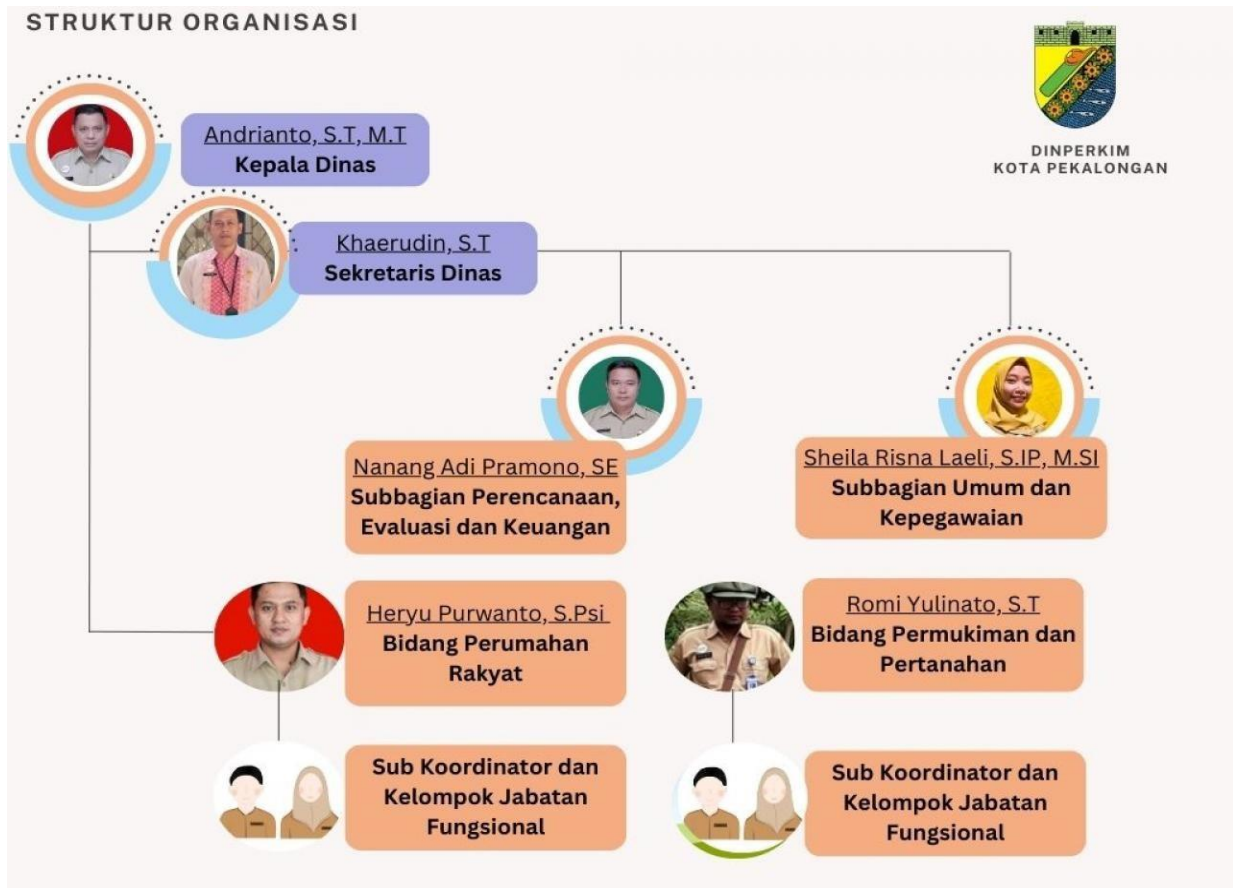
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari:
 - 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Pertanahan
 - 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dapat digambarkan pada Gambar pada halaman berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINPERKIM



Permasalahan-permasalahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam pelayanan sebagai berikut :

- Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (backlog) semakin bertambah tinggi;
- Rendahnya kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah;
- Belum optimalnya layanan drainase lingkungan permukiman;
- Kondisi jalan lingkungan belum optimal;

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) berperan penting dalam mendukung urusan perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada aspek pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan penyediaan hunian layak. Dukungan tersebut tercermin dalam tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah yang diselaraskan secara langsung dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD, antara lain sebagai berikut: adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah Misi ke -3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah rumah menyebabkan angka kekurangan rumah (backlog) semakin bertambah tinggi
2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan dan permukiman baru;
3. Adanya rumah-rumah yang berada di lahan illegal;
4. Timbulnya Rumah Tidak Layak Huni baru akibat kemiskinan dan genangan air;
5. Kondisi topografis Kota Pekalongan menyulitkan pengaturan saluran drainase, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-5%;
6. Genangan air yang memicu timbulnya kawasan kumuh baru

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Adanya program pembangunan Rumah Susun Sewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Adanya program sejuta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

3. Akan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
4. Adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat, bantuan pugar rumah dari Provinsi dan DAK Perumahan dan Permukiman

Isu Strategis berkaitan dengan infrastruktur sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Pemenuhan rumah / perumahan yang layak huni.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dan infrastruktur dasar permukiman lainnya sesuai dengan kondisi topografi disertai dengan upaya mendorong kesadaran masyarakat agar berperan aktif menjaga kualitas lingkungan permukiman. Pugar Rumah Tidak Layak Huni disertai dengan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman secara memadai. Penanganan kawasan kumuh.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) OPD, RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021–2026, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

Review ini dilakukan untuk menilai konsistensi perencanaan, relevansi strategi, kesesuaian indikator, serta efektivitas alokasi sumber daya dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Rencana kerja Dinperkim telah mendukung agenda nasional, terutama:

Agenda 6 RPJMN: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan fokus pada:

- Penanganan kawasan kumuh.
- Penyediaan rumah layak huni.

RPJMD Kota Pekalongan 2021–2026

Renja Dinperkim mendukung tujuan:

"Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan" Melalui sasaran:

- Meningkatnya jumlah rumah layak huni untuk MBR.
- Berkurangnya kawasan permukiman kumuh.

- Meningkatnya cakupan layanan dasar (sanitasi dan air bersih).

Renstra Dinperkim 2021–2026

Rencana kegiatan tahun 2026 telah mengacu pada indikator kinerja utama Renstra seperti:

- Jumlah RTLH yang direhabilitasi.
- Luasan kawasan kumuh yang ditangani.
- Rencana kegiatan tahun 2026 telah mengacu pada indikator kinerja utama Renstra seperti:
 - Jumlah RTLH yang direhabilitasi.
 - Luasan kawasan kumuh yang ditangani.
 - Persentase rumah tangga yang mengakses air minum dan sanitasi layak.
 - Persentase rumah tangga yang mengakses air minum dan sanitasi layak.

Strategi Penanganan:

Peningkatan rehabilitasi RTLH dengan basis data terpadu.

- Percepatan penanganan kawasan kumuh melalui pola kolaboratif (Kotaku, CSR, APBD).
- Penataan kawasan padat berbasis mitigasi bencana.
- Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan peningkatan sinergi dengan OPD teknis.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Langkah yang telah dilakukan dalam mengkaji usulan program dan kegiatan dari musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat desk batasan usulan program/kegiatan yang dapat diusulkan oleh masyarakat;
2. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
3. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
4. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
5. Bila belum lengkap melakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau memberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.lampiran pada (Tabel.T-C.32)

Tabel T-C-32
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kota Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		Rp.4.145.513.000	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.5.588.000,00	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Rp.2.628.947.000	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp.0	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Rp.102.525.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp.1.326.060.000	

			Pemerintahan Daerah		
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RP.82.393.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	Rp.1.421.998.000	
a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	21.900.000	
b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	32.850.000	
c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Kota Pekalongan	Presentase Rumah Layak	40.500.000	

	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)		
d.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pekalongan	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.580.089.000	
3	ROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pekalongan	Luas kawasan permukiman kumuh	27.293.916.000	
a.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Pekalongan	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	236,400,000	
b	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pekalongan	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	550,000,000	
c	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pekalongan	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	1,859,000,000	
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Pekalongan	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	8.516.098.000,	
a.	Pencegahan	Kota	Jumlah Rumah Tidak	6.815.714.000	

	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pekalongan	Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Pekalongan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	8.377.397.000	
a	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pekalongan	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	5.800.485.000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kota Pekalongan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	644.720.000	
a	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	644.720.000	

7	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kota Pekalongan	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	9.093.000	
A	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Kota Pekalongan		9.093.000,00	
				51.058.038.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan pedoman pembangunan nasional yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan lingkungan dan infrastruktur dasar. Dalam konteks ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kota Pekalongan perlu menyesuaikan arah kebijakan dan target kinerjanya agar sejalan dengan sasaran nasional, khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Penyesuaian dokumen perencanaan (Renja/Renja PD) dilakukan dengan menyelaraskan target kinerja Dinas terhadap sasaran RPJMN dan kebijakan sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sesuai Permen PKP Tahun 2025. Penyesuaian tersebut meliputi antara lain:

- a. Peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- b. Pelaksanaan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- c. Fasilitasi pembiayaan perumahan melalui KPR bersubsidi;
- d. Penyusunan basis data penerima bantuan menggunakan kriteria MBR terbaru sesuai regulasi Kementerian PKP.

Selain itu, Kota Pekalongan juga telah menjadi bagian dari Daftar Proyek Prioritas Strategis Nasional melalui program Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa. Indikasi target yang akan diwujudkan di antaranya meliputi:

- a. Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah;
- b. Terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai;
- c. Terbangunnya SPALDT (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat) permukiman dan perkotaan;
- d. Terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu melalui sistem Online Monitoring (ONLIMO);

- e.Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dan Kawasan;
- f .Pembangunan Jalan Lingkar Pekalongan;
- g.Serta penyusunan peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana banjir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, Kota Pekalongan tetap ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Wilayah Pengembangan Petanglong yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan. Kawasan ini menjadi simpul pertumbuhan ekonomi wilayah pantura bagian barat dengan potensi unggulan di sektor industri kreatif, perikanan, perdagangan, dan pariwisata berbasis budaya serta ekonomi rakyat.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, pengembangan Wilayah Petanglong diarahkan pada:

“Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Hilirisasi Industri Kreatif dan Berbasis Pertanian, dengan Prinsip Pembangunan Hijau, Inklusif, dan Berkelanjutan.”

Kebijakan tersebut sejalan dengan mandat RPJMN 2025–2029 serta mendukung tujuan pembangunan Kota Pekalongan dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, produktif, dan tangguh bencana. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan perlu menyinergikan program dan kegiatan agar mendukung capaian prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam aspek penataan kawasan, pengendalian lingkungan permukiman, dan pengembangan infrastruktur dasar perumahan di kawasan Petanglong.

3.3 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi OPD juga ada pertimbangan lain seperti :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Sesuai dengan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini diarahkan untuk mencapai Visi “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”. Dan telah dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk dapat mendukung misi ke 3,4 dan 7.

2. Pencapaian SDG's

Penerapan Sdgs pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan antar wilayah kota, dengan target mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota termasuk warga yang berkebutuhan khusus.

3. Pengentasan kemiskinan

Melalui pembangunan dari infrastruktur kota beserta sarana dan prasarananya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan yang ada pada Kota Pekalongan

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab/Kota, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendayagunaan Potensi Daerah

Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri

5. Pengembangan Daerah terisolir

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 | BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 19 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif

510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kab. Batang

Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang

Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Sehingga yang perlu mendapat perhatian adalah daerah yang bersebelahan dengan kota atau kabupaten lain.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota 2025-2030, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan :

1. Program Kawasan Permukiman

- a. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- c. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- d. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- e. Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- f. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
- g. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Ustilitas Umum (Psu)
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
4. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - c. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
 - d. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonstruksi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINPERKIM KOTA PEKALONGAN

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan pada tahun 2026 dan perkiraan maju pada tahun 2026, yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026, adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan yang mendukung infrastruktur Kota Pekalongan
- Sebagaimana Tabel T–C. 3.3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatana Penting	Prakiraan Maju Rencna Tahun 2027	
				Lokasi	Capaian Target Kinerja	Pagu indikatif	Sumber Dana			
									Target	PAGU INDIKATIF
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.573.102.000.00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,000,000	APBD		2 Dokumen	17,350,000	
		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Renja yang disusun	2 Dokumen	2,500,000	APBD		2 Dokumen	2,750,000	
		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1,500,000	APBD		2 Dokumen	1,650,000 0	
		Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 48	12,000,000	APBD		4 Dokumen	12,950,000	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	3,102,461,000	APBD		100 persen	3,352,671,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali 0 Orang/bulan	3,070,811,000	APBD		100 Persen	3,321,021,000
		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	30,000,000	APBD		12 Bulan	30,000,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun		1 Dokumen	1,650,000	APBD		1 Dokumen	1,650,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah		2 kali	9,500,000	APBD		2 kali	9,500,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 kali	9,500,000	APBD		2 kali	9,500,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		12 Bulan	234,000,000	APBD		12 bulan	209,686,000

		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Bulan	5.000.000	APBD		12 Bulan	5.000.000
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan		35 unit	52,000,000	APBD		35 unit	52,000,000
		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Bulan	2,000,000	APBD		12 Bulan	2.000.000
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Bulan	65,000,000	APBD		11 Bulan	49,186,000
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Bulan	7,500,000.	APBD		12 Bulan	5,000,000
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah		12 Bulan	2,500,000	APBD		12 Bulan	2,500,000

		Perundang-undangan i	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
		Sub kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 persen	100,000,000	APBD		100 persen	98,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	1,800,000	APBD		100 persen	1,800,000
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	1,800,000	APBD		12 Bulan	1,800,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	757,200,000	APBD		12 Bulan	758,200,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Bulan	195,000,000	APBD		12 Bulan	195,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	339,398,000	APBD		12 Bulan	286,357,000

		Pemerintahan Daerah								
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Bulan	113,398,000	APBD		12 Bulan	90,000,000
		SubKegiatanPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin berkala		1 unit	126,000,000	APBD		1 unit	76,357,0000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	100,000,000	APBD		1 unit	120,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun		1 dokumen	4,949,196,000	APBD		1 dokumen	1,714,461,000
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan		91,35 persen	75,000,000	APBD		91,35 persen	60,000,000

			Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, LahanLahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				90,000,000	APBD			50,000,000
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan		91,35 persen	10,000,000	APBD		91,35 persen	10,000,000

		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		91,35 persen	50,000,000	APBD		91,35 persen	30,000,000
		Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan		91,35 perse	30,000,000	APBD		91,35 perse	30,000,000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)		91,35 persen	1.420.000.000	APBD		89,66 Persen	1.420.000.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan		91,35 persen	3,584,196,000	APBD		100 Persen	264,461,000
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	umlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah rumah yang direhabilitasi		91,35 perse	262,500,000	APBD		320 SR	164,461,000
		Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1 lokasi	700,000,000	APBD		91,35 perse	0

		Rumah bagi Korban Bencana								
		Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah unit rumah yang terbangun bagi korban bencana		5 Unit	2,621,696,000	APBD		91,35 persen	100,000,000
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		100 Persen	1,200,000,000	APBD		100 Persen	1,200,000,000
		Sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusunawa yang dipelihara Jumlah unit villa/pesanggrahan (Pondok Boro) yang dipelihara		3 Unit 1 unit	1,200,000,000	APBD		91,35 persen	1,200,000,000
	Program Kawasan Permukiman				1 dokumen	2,645,400,000	APBD		1 dokumen	17,004,276,000
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		291,47 hektar	236,400,000	APBD		291,47 hektar	236,400,000
		Sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan	Jumlah Dokumen DE Konsultan Perencana disusun		2 Dokumen	168,000,000	APBD		2 Dokumen	168,000,000

		Permukiman Kumuh								
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha yang dilaksanakan		12 Kali	68,400,000	APBD		12 Kali	68,400,000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun		4 Kecamatan	550,000,000	APBD		4 Kecamatan	550,000,000
		Sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		4 Kecamatan	400,000,000	APBD		4 Kecamatan	100,000,000
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh yang disusun		1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	0

		Kumuh dan Permukiman Kumuh								
		Sub kegiatan Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi		2 Paket	50,000,000	APBD		2 Paket	150,000,000
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1,859,000,000	APBD			16,447,876,000
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun		1 Dokumen	74,000,000	APBD		291.47 Hektar	74,000,000
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH (IKK Output)		93 Unit	1,785,000,000	APBD		93 Unit	1,000,000,000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					6,620,000,000	APBD			4,588,188,000
		Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk		650 Unit	6,620,000,000	APBD		650 Unit	4,588,188,000

		Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)					628,030,000	APBD			614,521,000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU		1 Dokumen	628,030,000	APBD		1 Dokumen	614,521,000
		Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome))		1 Aplikasi	240,000,000	APBD		1 Aplikasi	230,000,000
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		330 meter 2 Unit 4 Lokasi	280,000,000	APBD		330 meter 2 Unit 4 Lokasi	280,000,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU) Jumlah		1 Dokumen 10 Unit	108,030,000	APBD		1 Dokumen 10 Unit	104,521,000

			perumahan yang telah menyerahkan aset PSU							
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan					320,000,000	APBD			1,090,262,000
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100 persen	320,000,000	APBD		100 persen	1,090,262,000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah Jumlah Ganti Rugi atas Tanah /Bangunan atas proyek Pemerintah Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah		4 Dokumen 2 Dokumen 2 lokasi 5 lokasi	320,000,000	APBD		4 Dokumen 2 Dokumen 2 lokasi 5 lokasi	1,090,262,000
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee					9,285,0000	APBD			9,086,000
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah		100 persen	9,285,000	APBD		100 persen	9,086,000

		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee							
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggara n Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah peresentase penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		25 persen	9,285,000			25 persen	9,086,000
					TOTAL	51.058.038.000				51.058.038.000,00

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan instrumen perencanaan tahunan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunan dokumen ini telah mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, dinamika kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam dalam dokumen renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawaasan Permukiman tahun 2026 Sebagai berikut:

- Penyesuaian sasaran dan indikator kinerja dengan arah RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029, khususnya pada aspek penyediaan rumah layak huni, pengelolaan kawasan kumuh, dan penataan kawasan pesisir.
- Melanjutkan dan memperluas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis data MBR terbaru.
- Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga keuangan dalam pembiayaan perumahan terjangkau (KPR subsidi dan sejenisnya).
- Melaksanakan program peningkatan kualitas permukiman perkotaan secara terpadu melalui pendekatan kawasan.
- Ketahanan Kawasan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Penguatan Data dan Sistem Informasi Permukiman, Pembaruan basis data rumah, MBR, dan kawasan kumuh untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based planning).

Rencana Tindak Lanjut Renja Tahun 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan

1. Penyesuaian Sasaran dan Indikator Kinerja dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Tindak Lanjut :

- Melakukan review dan penyesuaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja program (IKP) agar selaras dengan target RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025–2029.
- Melaksanakan koordinasi teknis dengan Bappeda dan Kementerian PUPR untuk penyelarasan sasaran prioritas bidang perumahan dan permukiman.

2. Pelaksanaan Program BSPS dan RTLH Berbasis Data MBR Terbaru

Tindak Lanjut :

- Melakukan pembaruan data penerima manfaat MBR melalui verifikasi lapangan dan integrasi dengan data kemiskinan daerah (DTKS).

- Mengoptimalkan alokasi dana BSPS/RTLH dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan prioritas wilayah kumuh dan pesisir.

Renja ini diharapkan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Pekalongan, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Keberhasilan implementasi Renja Tahun 2026 tentunya memerlukan komitmen yang kuat serta koordinasi yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan, baik antar perangkat daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi yang sinergis diharapkan dapat mempercepat terwujudnya lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, besar harapan kami agar dokumen ini dapat dijadikan rujukan yang valid dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan pada tahun perencanaan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pekalongan.

Pekalongan, 2025

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kota
Pekalongan**



ANDRIANTO, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730111 199803 1 006